

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual.¹

Pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Sebagai suatu proses, pembangunan tentu saja dilakukan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada sekaligus merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan tuntutan-tuntutan pergeseran waktu akibat berkembangnya peradaban, sistem sosial kemasyarakatan, dan teknologi yang lebih maju.

¹ Dewi novita, "Pengaruh Kesimkinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau", *Jurnal: JOM Fekon*, Vol. 4 No.1 (Januari, 2017) Fakultas Ekonomi Universitas Riau, h. 1.

Pada awalnya, pembangunan merupakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah dan negara, masyarakat dianggap pasif menjadi objek pembangunan.² Belakangan ini, perspektif baru tentang pembangunan berkembang, tidak lagi hanya memberikan beban kepada unsur pemerintah, melainkan mulai mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak ketiga seperti dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan keinginan semua pemerintah dan masyarakat di berbagai negara, tidak hanya sesaat. Pembangunan juga bukan selalu terkait dengan pembangunan bangunan beton menjulang tinggi dan elok untuk dipandang, tetapi pembangunan yang bermula dari mementingkan sumber daya manusianya itulah yang lebih urgen dari seluruh sektor pembangunan yang ada di Setiap negara. Ini sudah menjadi kesesuaian dalam berkehidupan, bagaimana mungkin negara yang ingin maju, pemerintahnya tidak mementingkan kualitas sumber daya manusianya.

² Dewi novita, "Pengaruh Kesimkinan dan Pertumbuhan Ekonomi ...h.1.

Sumber daya manusia memiliki peran penting dari terciptanya sebuah pembangunan, yaitu pembangunan yang bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan dapat menjalankan kehidupan yang produktif.³

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya manusia harus dapat berkembang dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Dalam arti sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. *Human Development Report (HDR)* menafsirkan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Pilihan yang dimaksud dan yang paling penting diantaranya yaitu pilihan untuk berumur panjang dan sehat, pilihan untuk berilmu

³ Astuti Maulida, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 1.

pengetahuan, dan pilihan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Sudah semestinya setiap individu mendapatkan haknya di dunia ini untuk menetapkan keinginannya hidup secara layak dari berbagai segi kebutuhan masing-masing hingga tercapainya kesejahteraan dalam suatu tatanan hidup bernegara.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan telah membuahkan hasil di suatu negara adalah indeks pembangunan Manusia (*Human Development Index/ HDI*). Pada dasarnya HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah Negara maju, Negara berkembang, atau Negara terbelakang. Namun, HDI juga dipercaya sebagai pengukur efektivitas program dan kebijakan pemerintah terhadap kualitas hidup penduduknya (negara kaya atau berpendapatan tinggi, negara berpendapatan menengah-atas, negara berpendapatan menengah-bawah, atau negara berpenghasilan miskin alias berpenghasilan rendah). HDI Indonesia relatif rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, dan di masa mendatang terancam akan kian tertinggal karena laju pertumbuhan HDI-nya juga tidak setinggi yang

dicapai oleh negara-negara lain. Dalam perkembangannya, HDI juga digunakan sebagai patokan umum yang mencerminkan sejauh mana kualitas sumber daya manusia di berbagai negara. Skor diberikan pada angka Antara 0 hingga 1. Semakin besar angkanya (kian mendekati angka 1) maka semakin besar HDI-nya, dan semakin baik hasil yang dibuahkan pembangunan manusia yang ada di negara bersangkutan. Secara implisit HDI menegaskan adanya hubungan yang sangat kuat dan langsung antara kondisi pendidikan dan kesehatan disatu pihak, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dalam analisis umum yang biasa diberikan UNDP, dinyatakan bahwa kenaikan 1 persen skor HDI akan mendorong kenaikan produktivitas tenaga kerja hingga 2,5 persen. Hal ini akan segera disusul dengan kenaikan tambahan pendapatan per kapita nasional sebesar 1,5 persen.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah sumber daya manusia yang cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang

⁴ Faisal Basri, *Catatan Satu Dekade Krisis :Transformasi, Masalah Struktural dan Harapan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009), h. 99.

menempati posisi ke-3 Di dunia setelah China dan India, dengan jumlah penduduk yang berada dalam jumlah usia produktif pada tahun 2009 sebesar 168.264.448 jiwa. Namun, besarnya jumlah sumber daya manusia di Indonesia ini, belum dapat dimaksimalkan potensinya, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dari tahun ke tahun.⁵ Hal ini juga yang menyebabkan pendapatan per kapita yang kurang memadai untuk dibilang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dari segi pengeluaran per kapita Indonesia masih terbilang rendah, sehingga daya konsumsi per kapita rumah tangga pun kurang terpenuhi dengan cukup. Menurut Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia dalam paparannya di Jakarta.

Pada tahun 2015, bahwa nominal rupiah pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Indonesia mencapai Rp 10,15 juta per tahun. Selama lima tahun terakhir dan pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat meningkat sebesar 1,51 persen per tahun. pada tahun, 2010 pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Indonesia sebesar Rp 9,43 juta per tahun. Angka tersebut meningkat pada 2011 menjadi sebesar Rp 9,64 juta per tahun, dan pada 2012 menjadi Rp 9,81 juta per tahun. Pada tahun berikutnya, pengeluaran per kapita disesuaikan

⁵ Didin S Damanhuri dan Muhammad Findi, *Masalah dan Kebijakan: Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Bogor: Penerbit IPB Pers, 2014), h.102.

masyarakat Indonesia mencapai Rp 9,85 juta per tahun, dan pada 2014 mencapai level Rp 9,9 juta per tahun. Kendati mengalami kenaikan tiap tahun, pengeluaran per kapita per hari masih rendah, atau sekitar Rp 27.808 per hari. Pengeluaran per kapita yang hanya sebesar Rp 27.808 per hari dinilai tidak memenuhi standar hidup layak, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar.⁶

Berbeda sudut pandang, Enny Sri Hartati Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) kepada *kompas.com*.

Kalau per hari Rp 27.808. Sekali makan di warteg saja Rp 15.000. Tiga kali makan sudah Rp 45.000. Pengeluaran per kapita sebesar Rp 27.808 tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Kekurangan nutrisi akan berdampak terhadap daya berpikir, dan berujung pada kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain tentu saja tidak semua orang memiliki pengeluaran yang sama. Sebanyak 20 persen masyarakat terkaya tentu saja memiliki pengeluaran jauh di atas angka tersebut. Namun, sebanyak 40 persen masyarakat bawah mungkin saja mengalami kesulitan belanja. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk meningkatkan IPM adalah dimulai dari meningkatkan pendapatan bagi masyarakat bawah. Pertama, yang harus dipenuhi adalah sumber pendapatan, karena sumber pendapatannya tidak memadai.⁷

⁶ Estu Suryowati, "Pengeluaran per Kapita Masyarakat Indonesia Hanya Rp 27.808 per Hari".<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/06/15/212532926/pengeluaran.per.kapita.masyarakat.indonesia.hanya.rp.27.808.per.hari> di akses pada tanggal 09 Oktober 2018 pukul 22.00 WIB.

⁷ Estu Suryowati, "Pengeluaran per Kapita Masyarakat Indonesia Hanya Rp 27.808 per Hari".<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/06/15/>

Untuk Provinsi Banten, dalam perspektif pengeluaran per kapita menggunakan pendekatan Wilayah dapat diketahui, jika pengeluaran per kapita Provinsi Banten mempunyai nilai yang signifikan dikarenakan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, ini dapat dibuktikan dari data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Banten. Pengeluaran per kapita Provinsi Banten periode 2012- 2016, sebagai berikut:

Tabel 1.1

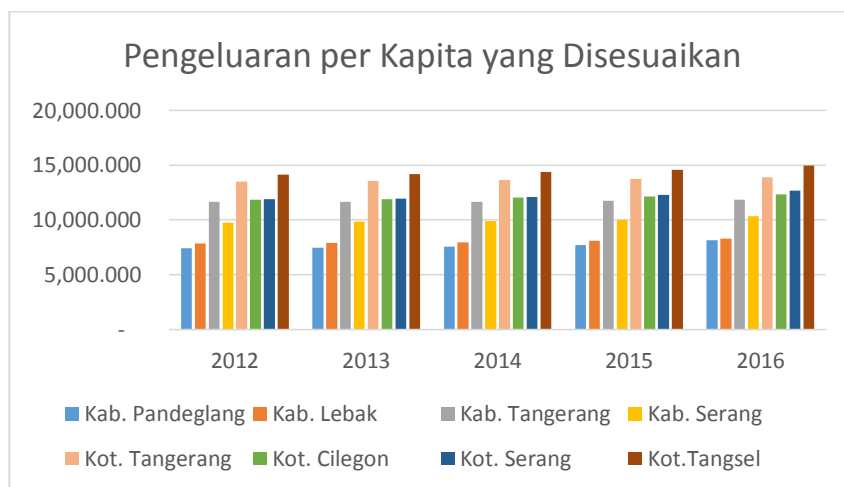
**Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kab/Kota di
Provinsi Banten (Ribu Rp/ Tahun) Periode 2012-2016**

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Pandeglang	7 426	7 486	7 589	7 730	8 138
Kab. Lebak	7 859	7 918	7 977	8 111	8 308
Kab. Tangerang	11 640	11 648	11 666	11 727	11 863
Kab. Serang	9 777	9 831	9 886	10 004	10 317
Kot. Tangerang	13 515	13 531	13 671	13 766	13 911
Kot. Cilegon	11 852	11 920	12 057	12 127	12 326
Kot. Serang	11 880	11 950	12 091	12 289	12 660
Kot. Tangsel	14 131	14 207	14 361	14 588	14 972
Banten	11 008	11 061	11 150	11 261	11 469

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten*

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 hingga 2016, angka yang tersaji dalam tabel data pengeluaran per kapita di Provinsi Banten, yang terdiri dari 4 kabupaten/kota menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, bahkan sama sekali tidak terjadi penurunan satu angka pun dari setiap kabupaten/kota setiap tahunnya. Sehingga berdampak pula pada kenaikan dalam angka pengeluaran per kapita Provinsi Banten, terhitung dari tahun 2012 sampai 2016 terakumulasi telah terjadi kenaikan pengeluaran per kapita sebanyak 461 ribu.

Gambar 1.1
Perbandingan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan antar
Kab/Kota di Provinsi Banten (Ribu Rp/ Tahun)
Periode 2012-2016



Sedangkan jika kita teliti lebih dalam dengan pendekatan wilayah Provinsi di Indonesia. Indeks pembangunan manusia Provinsi Banten menunjukkan peningkatan dari 70,27 pada tahun 2015 menjadi 70,96 pada tahun 2016. IPM tersebut ditopang oleh angka harapan hidup sepanjang 69,46 tahun, Harapan Lama Sekolah sepanjang 12,70 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sepanjang 8,37 tahun, dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan sebesar 11,46 juta rupiah per tahun.⁸

Indeks pembangunan manusia dengan pengeluaran per kapita, mengalami perkembangan yang sangat signifikan di Provinsi Banten dari tahun 2012-2016 terbukti selalu mengalami kenaikan angka setiap tahunnya, dari data di bawah sebagai berikut.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Banten Dalam Angka 2017*, (Banten: BPS Provinsi Banten), 2017, h. 98.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di
Provinsi Banten (Persen %/tahun) Periode 2012-2016

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Pandeglang	60.48	61.35	62.06	62.72	63.40
Kab. Lebak	60.22	61.13	61.64	62.03	62.78
Kab. Tangerang	68.83	69.28	69.57	70.05	70.44
Kab. Serang	62.97	63.57	63.97	64.61	65.12
Kot. Tangerang	74.57	75.24	75.87	76.08	76.81
Kot. Cilegon	70.07	70.99	71.57	71.81	72.04
Kot. Serang	69.43	69.69	70.26	70.51	71.09
Kot. Tangsel	77.68	78.65	79.17	79.38	80.11
Banten	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96

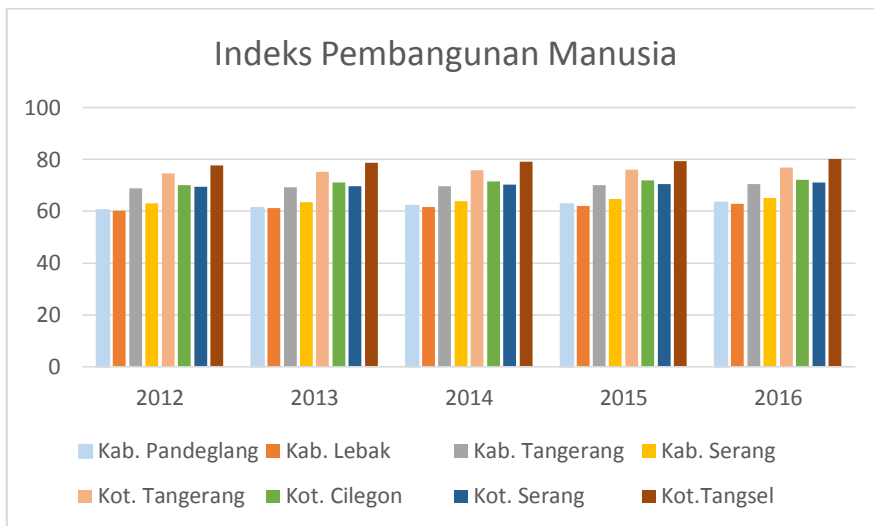
Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten*

Pada Tabel 1.2, terlihat bahwa pertumbuhan indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2012-2016 mengalami kenaikan yang signifikan juga. Sampai pada angka tertingginya di tahun 2016 yaitu 70.96 artinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2015 sebesar 0.69. Kemudian, jika diakumulasikan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 telah terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 2,04. Artinya, adanya peningkatan dari IPM di Provinsi Banten tak lain adalah faktor

pendukung IPM lainnya seperti ditopang oleh angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang juga mengalami kenaikan.

Gambar 1.2

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar Kab/Kota di Provinsi Banten (persen %/tahun) Periode 2012-2016



Alasan penulis, melakukan penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan berdasarkan latar belakang permasalahan di atas. Provinsi Banten ini, yang secara administratif terbagi menjadi beberapa bagian kabupaten/kota di antaranya 4 kabupaten dan 4 kota, dengan banyaknya jumlah

kabupaten/kota, tentunya akan memberikan gambaran bagi peneliti mengenai pembangunan manusia yang bervariasi dalam satu provinsi. Begitu pun dapat menjadi penting, berguna, bermanfaat untuk mendukung dan sekaligus memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dengan menjadikan variabel pengeluaran per kapita dan indeks pembangunan manusia sebagai parameter penelitian. Dengan demikian, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“PENGARUH PENGELUARAN PER KAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BANTEN PERIODE 2012-2016”***.

B. Batasan Masalah

1. Dimensi

Pada variabel independen (pengeluaran per kapita) objek yang akan diteliti adalah data pengeluaran dalam rupiah pertahun yang sudah mencakup data untuk pengeluaran kelompok makanan dan bukan makanan rumah tangga. Pada variabel dependen (indeks pembangunan manusia) objek

penelitian yang akan diteliti adalah data indeks pada pembangunan manusia yang merupakan dari indikator pendukungnya IPM yaitu angka harapan hidup saat lahir, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

2. Waktu

Data yang digunakan adalah data *time series* pengeluaran per kapita dan indeks pembangunan manusia dari tahun 2012 sampai tahun 2016.

3. Tempat

Objek penelitiannya adalah di Provinsi Banten meliputi keseluruhan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten yaitu yang terdiri dari Kabupaten/Kota diantaranya: Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kota Cilegon.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting, karena langkah ini akan menentukan kemana suatu

penelitian akan diarahkan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis mencoba menarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten Periode 2012-2016?
2. Seberapa besar pengaruh pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten Periode 2012-2016?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten Periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten Periode 2012-2016.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat ataupun kegunaan bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan manfaat maupun masukan-masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten agar lebih memperhatikan indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten.

2. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak lain sehingga dapat mengetahui seberapa besar pengeluaran per kapita dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia melalui penerapan ilmu dan

teori yang penulis peroleh di bangku perkuliahan dan mengaplikasikannya kedalam teori penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pihak akademisi. Sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Lima jenis ini kebutuhan pokok ini bagi sebagian penduduk, bukan saja mahal untuk diperoleh. Di sisi lain, kebutuhan akan lima jenis kebutuhan pokok ini sangat diperlukan untuk memperahankan taraf hidup yang layak.⁹

Dalam hal pangan, tidak hanya jumlahnya saja yang harus mendapat perhatian, tapi juga mutu dan penyediaan gizinya. Selain itu, akses untuk memperoleh pangan haruslah dipelihara,

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2016*, (Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2016), h. 3.

sehingga kebutuhan setiap penduduk akan pangan yang layak untuk dikonsumsi menjadi lebih terjamin. Adapun dalam hal sandang, selain masalah etika kesopanan dalam bersosialisasi di masyarakat, juga yang terpenting adalah tercermin dari pemeliharaan akan kebudayaan dan peradaban manusia. Makin disadari pula bahwa fokus pembangunan haruslah bertumpu kepada manusia. Pilihan masyarakat terhadap arah, tujuan dan jalan yang ditempuh dalam pembangunan, haruslah yang dapat meningkatkan secara sepenuhnya keberdayaan dan keikutsertaan mereka dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain meliputi kemiskinan dan pengangguran, serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.¹⁰ keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur yang telah dibuat sebagai acuan untuk ukuran pembangunan manusia untuk semua wilayah.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia ...* h.13.

Indeks pembangunan manusia dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar sebagai ukuran pencapaian dasar pembangunan manusia; Umur panjang; pengetahuan; dan standar hidup layak.¹¹ Indeks pembangunan manusia ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP sebagai suatu ukuran standar pembangunan manusia pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjadi indikator yang penting dan populer, sehingga diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia.

IPM mengalami beberapa kali perubahan dalam metodologinya untuk melakukan penyempurnaan yaitu pada tahun 1991 dan 1995, serta perubahan metodologi di tahun 2010.¹²

Pada tahun 1990, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diproksi dengan

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Banten Dalam Angka...* h. 91.

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia ...* h.20.

angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan menggunakan angka PDB per kapita. Untuk merangkai ketiga dimensi sehingga menjadi sebuah indeks komposit. Selang satu tahun UNDP melakukan penyempurnaan perhitungan IPM dengan menambah variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Kemudian UNDP pada tahun 1995 melakukan kembali penyempurnaan dengan mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pada tahun 2010, UNDP mengubah metodologi penghirungan IPM dengan perubahan drastis dengan indikator yang lebih relevan dengan menyebutnya sebagai metode baru. Indikator angka partisipasi kasar gabungan diganti dengan indikator harapan lama sekolah. Indikator PDB per kapita diganti dengan PNB per kapita.

Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan perhitungan metode baru. Dengan melihat secara mandalam tentang kelemahan pada perhitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbarui perhitungan untuk

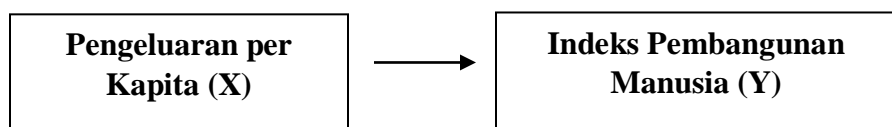
menjawab tantangan masyarakat Internasional.¹³ Pada tahun 2014 Indonesia secara resmi melakukan perhitungan IPM menggunakan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

1. Angka harapan hidup pada saat lahir.
2. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. Pengeluaran per kapita setahun disesuaikan.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Dengan rata-rata pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh dari susenas, dibuat konstan dengan menggunakan tahun dasar 2012.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran



¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia ...* h.25.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis menurut Suharsimi Arikunto didefinisikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.¹⁴

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_a = Pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Banten.

H_o = pengeluaran per kapita tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan di Banten.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: dalam bab I ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, batasan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 110.

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka: pada bab ini membahas mengenai teori pengeluaran per kapita dan indeks pembangunan manusia, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian: pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian: membahas mengenai data yang diperoleh dan dikumpulkan, dan kemudian dianalisis menggunakan SPSS 23.0.

BAB V Penutup: dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.